

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Aspek keamanan merupakan hakikat penting bagi negara dalam rangka melindungi kedaulatannya. Sehingga apabila muncul ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, maka secara langsung akan membuat negara bertindak untuk meningkatkan aspek keamanan dan pertahanannya untuk menghadapi ancaman tersebut. Selat Malaka merupakan wilayah perairan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dengan maraknya aksi pembajakan yang terjadi di wilayah tersebut membuat keamanan jalur pelayaran Selat Malaka menjadi perhatian ketiga negara (*littoral states*). Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan tersebut maka *littoral states* bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan maritim di Selat Malaka. Terlebih lagi Selat Malaka merupakan jalur SLOT dan SLOC yang sangat berperan penting bagi dunia internasional. Sehingga apabila terjadi tindak kejahatan di sana maka tidak hanya berakibat pada *littoral states* saja melainkan dapat berakibat bagi pelayaran internasional. Dalam hal ini, terkadang suatu negara tidak mampu dalam menciptakan keamanan bagi negaranya secara individual dan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang dialami. Sehingga kerjasama menjadi satu-satunya cara untuk menunjang negara dalam menghadapi ancaman bersama.

Dengan didasari oleh ancaman keamanan yang sama, yakni pembajakan di wilayah Selat Malaka, pada akhirnya membuat *littoral states* melakukan

kerjasama keamanan dengan dibentuknya MALSINDO *Malacca Strait Coordinated Patrol*. Kerjasama ini kemudian diikuti oleh Thailand pada tahun 2008. Melalui kerjasama ini keempat negara melakukan berbagai program dalam penanganan isu pembajakan, seperti *Malacca Strait Sea Patrol*, *The Eyes in The Sky* dan Bursa Intelijen Grup. Semenjak kerjasama ini dibentuk, tingkat penyerangan pembajakan di wilayah Selat Malaka menurun dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Namun kemudian aksi pembajakan kembali terjadi pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014. Lalu pada periode 2014 sampai 2017 angka perompakan di selat malaka kembali menurun hingga mencapai angka 0 pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini ditunjukkan oleh laporan serangan pembajakan yang dikeluarkan ICC IMB *Piracy and Armed Robbery Annual Report*. Jadi, kerjasama MSSP telah berhasil menanggulangi kasus perompakan yang terjadi dengan adanya juga peningkatan militer laut masing-masing Negara terkait yang tergabung dengan MSSP.

VI.2 Saran

Pada dasarnya kerjasama ini telah cukup baik dalam menyelesaikan persoalan pembajakan di Selat Malaka. Hal ini terbukti dengan tingkat penyerangan yang mengalami penurunan pada awal terbentuk kerjasama, hingga data menunjukkan tidak adanya kasus pembajakan yang terjadi dalam kurun waktu selama tahun 2010. Namun dengan banyaknya persoalan yang masih mengemuka di antara negara anggota MSSP, kerjasama ini dikhawatirkan tidak akan berhasil dalam jangka waktu panjang. Sehingga agar kerjasama ini dapat terus berkontribusi positif terhadap perkembangan kasus

pembajakan di Selat Malaka setidaknya terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yaitu:

1. Mempersatukan persepsi keamanan masing-masing negara. Hal ini penting dilakukan mengingat masih adanya perbedaan kepentingan dalam melakukan pengamanan di selat. Seperti halnya persoalan definisi mengenai pembajakan yang dipegang oleh masing-masing negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan definisi akan sangat mempengaruhi regulasi keamanan yang akan diterapkan. Sehingga dengan menyamakan pandangan mengenai ancaman keamanan itu sendiri sangat penting diperhatikan oleh littoral *states*, agar penanganan ancaman dapat terkoordinasi dengan baik antara yang satu dengan lainnya. Karena jika hal ini dibiarkan maka akan mengganggu dan menghambat kerjasama yang akan dilakukan. Bahkan dikhawatirkan akan memicu perdebatan yang akan berujung pada konflik di antara sesama anggota.
2. Membangun rasa saling percaya (*confidence building measure*) di antara negara anggota MSSP. Walaupun keempat negara tergabung dalam suatu wadah kerjasama, namun rasa rivalitas diantara mereka masih sangat menonjol. Hal ini tidak terlepas dari rasa sensitivitas kedaulatan yang selalu membayangi negara-negara tersebut. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya inisiatif kerjasama-kerjasama yang lebih dalam yang melibatkan empat

negara tersebut, agar rasa curiga dapat dikurangi seminimal mungkin.

3. Pembangunan rasa saling percaya ini sekaligus dapat meningkatkan sifat kerjasama yang dilakukan, dari *coordinate patrol* menjadi *joint patrol* agar dapat lebih mengintensifkan kegiatan patroli di Selat Malaka dan memperbolehkan masing-masing negara untuk melakukan *crossborder* ke wilayah negara lain.
4. Menjalankan upaya kerjasama secara kontinuitas atau berkelanjutan. Hal ini perlu diperhatikan karena walaupun kerjasama MSP telah menunjukkan keberhasilan hingga tahun 2010, tetapi tidak serta merta kerjasama yang dilakukan menjadi longgar. Kesadaran masing-masing negara anggota akan pentingnya Selat Malaka harus tetap diutamakan. Sehingga kerjasama yang telah ditetapkan dapat terus dilakukan tanpa mengurangi intensitas patroli pengamanan di Selat Malaka.
5. Bekerja sama dengan negara-negara di luar kawasan. Keterlibatan negara-negara pengguna jalur pelayaran telah diatur dalam Artikel 43 UNCLOS, sehingga *littoral states* dapat lebih mengembangkan kerjasama dengan *external countries* yang memiliki kapabilitas kemampuan yang jauh lebih memadai. Kerjasama ini dapat membantu *littoral states* dalam meningkatkan kemampuan persenjataan dan peralatan keamanan di sepanjang Selat Malaka.

Bantuan ini dapat berupa bantuan secara teknis, latihan bersama, *sharing intelligence*, serta bantuan peralatan seperti kapal dan radar.

6. Kesatuan komando juga sangat penting diperhatikan terutama bagi Indonesia yang memiliki 13 instansi pemerintah yang berwenang di laut. Sehingga untuk dapat meningkatkan pertahanan di Selat Malaka dengan baik maka semua instansi yang ada harus memiliki visi yang sama tentang laut Indonesia agar dalam pelaksanaan keamanannya dapat berjalan dengan lancar dan selaras.

